

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 BERDASARKAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Mohamad Djasuli¹, Nor Khoriatul Aini², Safriatul Jennah³, Siti Aisyah⁴
Universitas Trunodjoyo Madura Akutansi FEB¹

djasuli@trunodjoyo.ac.id¹, ainiyesin0@gmail.com², safriatuljennah@gmail.com³,
sitiaisyah71193@gmail.com⁴

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Sampang Regency Government in 2025 based on the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The research uses a quantitative descriptive method with an approach to the analysis of the ratio of effectiveness and efficiency. The data used are secondary data obtained from media publications, financial reports and related literature. The results of the study show that the realization of regional revenue is very effective with an achievement rate of 100%, but the revenue structure is still dominated by transfer funds from the central government which shows low regional fiscal independence. Meanwhile, the realization of regional expenditure only reached 66.17% and the efficiency ratio was 102%, which indicates that budget management has not been efficient. Overall, the financial performance of Sampang Regency in 2025 is not optimal because there is still an imbalance between budget planning and implementation. Therefore, improvements are needed in the aspects of planning, implementation, and budget supervision to improve regional financial performance in the future.

Keywords: APBD, regional financial performance, effectiveness, efficiency, budget realization

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang tahun 2025 berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis rasio efektivitas dan efisiensi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi media, laporan keuangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah tergolong sangat efektif dengan tingkat pencapaian sebesar 100%, namun struktur pendapatan masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat yang menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal daerah. Sementara itu, realisasi belanja daerah hanya mencapai 66,17% serta rasio efisiensi sebesar 102%, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran belum efisien. Secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah Kabupaten Sampang tahun 2025 belum optimal karena masih terdapat ketidakseimbangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek perencanaan,

pelaksanaan, serta pengawasan anggaran guna meningkatkan kinerja keuangan daerah di masa mendatang.

Kata kunci: APBD, kinerja keuangan daerah, efektivitas, efisiensi, realisasi anggaran

A. Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi di daerah. Besarnya realisasi anggaran dan jenis belanjanya mengindikasikan tingkat komitmen dan prioritas pemerintah daerah terhadap pembangunan. APBD tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah daerah serta berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas (Suriadi, 2025) ; Bastian (2017).

Pengelolaan keuangan dalam suatu daerah sangatlah penting dilakukan oleh Pemerintah. Kinerja dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah jika dilakukan dengan baik dan benar

maka akan menghasilkan perkembangan pembangunan bagi daerah, serta dapat mensejahterakan masyarakat. Selain itu juga harus meningkatkan pengelolaan potensi PAD dengan benar dan sesuai agar dapat menunjang pendapatan untuk perkembangan kabupaten/kota yang ada. Kinerja keuangan daerah dapat dinilai melalui tingkat realisasi anggaran, khususnya pada komponen belanja daerah. Tingkat penyerapan anggaran mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Semakin tinggi realisasi anggaran, maka semakin baik kinerja keuangan daerah tersebut Mahmudi, (2016).

Namun, dalam praktiknya masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi permasalahan rendahnya penyerapan anggaran. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti lemahnya perencanaan, keterlambatan proses administrasi, serta kendala teknis dalam pelaksanaan program.

Kabupaten Sampang sebagai salah satu daerah di Jawa Timur juga mengalami kondisi tersebut. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh media, realisasi belanja APBD Kabupaten Sampang tahun 2025 baru mencapai 66,17% menjelang akhir tahun anggaran Tribun News, (2025). Angka ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah masih belum optimal dan perlu dianalisis lebih lanjut.

Penelitian mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah banyak dilakukan, khususnya yang membahas proses penyusunan anggaran, seperti penggunaan asumsi ekonomi, prosedur penganggaran, transparansi, serta partisipasi publik. Rahman dan Djasuli (2024) mengemukakan bahwa kelemahan dalam penetapan asumsi ekonomi serta kurang optimalnya prosedur penyusunan APBD dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara rencana anggaran dengan realisasinya. Meskipun demikian, kajian tersebut lebih bersifat konseptual dan berbasis studi literatur, sehingga belum memberikan gambaran empiris mengenai dampak

langsung terhadap kinerja keuangan daerah.

Di sisi lain, penelitian terkait kinerja keuangan daerah umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis rasio, seperti rasio efektivitas dan efisiensi, untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih terbatas pada pengukuran hasil kinerja tanpa mengkaji secara lebih mendalam keterkaitannya dengan proses perencanaan anggaran, khususnya yang berkaitan dengan asumsi dan prosedur dalam penyusunan APBD.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian antara kajian yang berfokus pada aspek perencanaan APBD secara konseptual dan penelitian yang menilai kinerja keuangan daerah secara empiris. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan analisis kuantitatif kinerja keuangan daerah Kabupaten Sampang tahun 2025 melalui rasio efektivitas dan efisiensi, serta mengaitkannya dengan aspek perencanaan anggaran yang meliputi asumsi dan prosedur penyusunan

APBD. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara perencanaan anggaran dan kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Sampang tahun 2025 berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi, guna menilai tingkat keberhasilan serta efisiensi pemerintah daerah dalam mengelola dan merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi kinerja keuangan daerah berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi media, laporan keuangan, dan literatur terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rasio efektivitas, yaitu dengan membandingkan antara realisasi

anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan. Analisis ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran serta untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan daerah Kabupaten Sampang tahun 2025 dapat dikategorikan efektif atau tidak.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

**Tabel 1 Data Keuangan Kabupaten
Sampang 2025**

No	Akun	Anggaran	realisasi	Persentase
1	Pendapatan Daerah	2.050,07 M	553,77 M	27.01%
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	420,25 M	127,11 M	30.25%
3	Pendapatan transfer	1.528,24 M	424,62 M	27.78%
4	Pendapatan lainnya	101,58 M	2,04 M	2.01%
5	Belanja Daerah	2.098,58 M	431,80 M	20.58%

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sampang Tahun 2025, total pendapatan daerah yang berhasil direalisasikan mencapai Rp553,77 miliar. Pendapatan tersebut bersumber dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan lain-lain. Realisasi PAD tercatat sebesar Rp127,11 miliar,

yang memberikan kontribusi sekitar 30.25% terhadap total pendapatan daerah. Persentase ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan secara mandiri masih terbatas. Di sisi lain, pendapatan transfer menjadi sumber pendapatan terbesar dengan nilai Rp1.528,24 miliar atau sekitar 27.78% dari total pendapatan. Besarnya proporsi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sampang masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat. Sementara itu, pendapatan lain-lain yang sah terealisasi sebesar Rp2,04 miliar dengan kontribusi sekitar 2.01%, yang menunjukkan bahwa perannya dalam struktur pendapatan daerah relatif kecil dibandingkan komponen lainnya.

Total realisasi belanja daerah Kabupaten Sampang pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp431,80 miliar. Pengeluaran tersebut dialokasikan ke dalam beberapa jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja lainnya.

Belanja pegawai merupakan komponen dengan porsi terbesar, yaitu sebesar Rp259,17 miliar atau sekitar 30.24% dari total belanja

daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan aparatur pemerintah.

Rasio Efektivitas

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{553,77}{553,77} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Rasio Efisiensi

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{431,80}{553,77} \times 100\% = 77,97\% \end{aligned}$$

Kinerja realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Sampang tahun 2025 dapat dinilai melalui tingkat pencapaian antara realisasi pendapatan dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan potensi pendapatan yang telah direncanakan. Dalam analisis ini digunakan rasio efektivitas, yang merupakan perbandingan antara realisasi pendapatan dan target pendapatan daerah.

Berdasarkan data yang tersedia, total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sampang tahun 2025 tercatat sebesar Rp553,77 miliar. Karena tidak tersedia data target pendapatan secara rinci, maka diasumsikan bahwa nilai target setara dengan realisasi, sehingga diperoleh rasio efektivitas sebesar 100%.

Nilai rasio efektivitas sebesar 100% menunjukkan bahwa kinerja realisasi pendapatan daerah berada pada kategori sangat efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu mencapai seluruh target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Namun demikian, apabila ditinjau dari komposisi sumber pendapatan berdasarkan realisasi tahun 2025, kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar sekitar 30,25%, diikuti oleh pendapatan transfer sebesar 27,78%, serta pendapatan lainnya sebesar 2,01%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun PAD memberikan kontribusi relatif lebih besar dibandingkan komponen lainnya, peran pendapatan transfer masih cukup signifikan dalam struktur pendapatan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat

kemandirian fiskal daerah masih belum optimal karena daerah masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Kinerja realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Sampang tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun terdapat kontribusi PAD yang cukup dominan, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memperkuat kemandirian keuangan daerah. Kinerja realisasi anggaran belanja daerah Kabupaten Sampang tahun 2025 dapat dianalisis melalui tingkat efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan dalam periode yang sama. Pengukuran ini menggunakan rasio efisiensi yang dihitung dari perbandingan antara total belanja yang direalisasikan dengan pendapatan yang berhasil diperoleh daerah. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp431,80 miliar, sedangkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp553,77 miliar, sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar sekitar 77,97%. Nilai rasio yang berada di bawah 100%

menunjukkan bahwa pengeluaran daerah lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran relatif efisien, namun juga dapat mencerminkan belum optimalnya penyerapan anggaran yang telah direncanakan.

Jika dilihat dari struktur belanja, porsi terbesar masih didominasi oleh belanja pegawai, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk kebutuhan operasional pemerintahan. Hal ini mengindikasikan bahwa ruang fiskal untuk belanja yang bersifat produktif masih terbatas. Dengan demikian, kinerja realisasi anggaran belanja daerah Kabupaten Sampang tahun 2025 dapat dikategorikan cukup efisien, namun tetap memerlukan optimalisasi dalam penyerapan anggaran serta pengalokasian belanja yang lebih produktif guna mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Secara umum, kinerja keuangan daerah Kabupaten Sampang tahun 2025 menunjukkan kondisi yang belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat realisasi belanja yang hanya mencapai 20,58%. Rendahnya tingkat penyerapan anggaran menunjukkan

adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi anggaran antara lain keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, lemahnya perencanaan anggaran, hambatan birokrasi, serta perubahan kebijakan selama tahun berjalan. Selain itu, fenomena penumpukan anggaran di akhir tahun juga menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berjalan secara merata sepanjang periode anggaran.

Selain faktor-faktor teknis tersebut, permasalahan kinerja keuangan daerah juga dapat dianalisis dari aspek perencanaan anggaran, khususnya terkait asumsi dan prosedur dalam penyusunan APBD. Djasuli, Mohamad & Rahman, (2024) menyatakan bahwa kualitas APBD sangat dipengaruhi oleh ketepatan asumsi ekonomi yang digunakan, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan target pendapatan daerah. Dalam praktiknya, asumsi tersebut seringkali bersifat terlalu optimistis sehingga tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara

anggaran yang direncanakan dengan realisasinya.

Selain itu, Djasuli, Mohamad & Rahman, (2024) juga menekankan bahwa prosedur penyusunan APBD yang kompleks serta lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dapat menghambat implementasi anggaran secara optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, dimana berbagai kendala teknis seperti keterlambatan pengadaan dan hambatan birokrasi menjadi faktor utama rendahnya penyerapan anggaran. Dengan demikian, permasalahan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Lebih lanjut, aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik juga berperan penting dalam menentukan kualitas APBD. Djasuli, Mohamad & Rahman, (2024) menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran dapat menyebabkan program yang direncanakan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan program dan

pada akhirnya memengaruhi tingkat realisasi anggaran.

Dari sisi efisiensi, rasio efisiensi yang berada di bawah 100% menunjukkan bahwa realisasi belanja masih lebih rendah dibandingkan pendapatan. Meskipun hal ini mengindikasikan efisiensi, kondisi tersebut juga mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan anggaran yang tersedia. Selain itu, dominasi belanja pegawai menunjukkan bahwa alokasi anggaran masih lebih banyak diarahkan pada kebutuhan operasional pemerintahan dibandingkan pada belanja yang bersifat produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya realisasi belanja daerah dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan dan pelayanan publik. Program-program yang telah direncanakan tidak dapat berjalan secara maksimal sehingga manfaatnya tidak dirasakan secara optimal oleh masyarakat Mahmudi, (2016). Namun, di sisi lain, realisasi yang tidak terlalu tinggi juga dapat mencerminkan adanya kehati-hatian pemerintah dalam penggunaan anggaran guna menghindari penyimpangan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Sampang tahun 2025 masih belum optimal. Meskipun realisasi pendapatan daerah menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik dengan capaian sebesar 100%, struktur pendapatan daerah menunjukkan bahwa kontribusi dari berbagai sumber belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian fiskal yang kuat, sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah masih perlu terus dilakukan.

Di sisi lain, realisasi belanja daerah yang hanya mencapai sekitar 20,58% serta rasio efisiensi sebesar 77,97% menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran relatif efisien, namun belum optimal dalam hal penyerapan anggaran. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga anggaran yang telah dialokasikan belum dimanfaatkan secara maksimal. Secara keseluruhan, permasalahan kinerja keuangan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga berkaitan dengan kelemahan dalam

perencanaan anggaran, proses birokrasi, serta koordinasi antar perangkat daerah. Dampaknya, pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan anggaran agar kinerja keuangan daerah dapat meningkat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Djasuli, Mohamad & Rahman, Z. (2024). *Tinjauan Kritis terhadap Asumsi dan Prosedur dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)* Zaenur. 10(24), 889–895.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun. Moh, Sulistyowati Firma dan Purwanugraha Heribertus. 2015.

Akuntansi Sektor Publik. BPFE-
Yogyakarta.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mikhael, K., Taslim, D., Darasih, R., & Manajemen, P. S. (2026). *Pengaruh Integrasi Rantai Pasokan terhadap Kinerja Organisasi Nirlaba : Peran Mediasi Praktik Rantai Pasokan Berkelanjutan dan Moderasi Tantangan Rantai Pasok Pada LAZNAS Al Irsyad di Jawa Barat*. 9(1), 75–88.

Suriadi, H. (2025). *Jurnal Ilmu Sosial , Ekonomi dan Pendidikan*. 1(1), 42–54.